

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
INTISARI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	
1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan	9
2. Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Navigasi Penerbangan	
1. Penerbangan Sipil	10
2. Navigasi Penerbangan	14
B. Tinjauan Tentang Penyelenggara Navigasi Penerbangan Di Indonesia	21

C. Tinjauan Tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan	26
D. Tinjauan Tentang Perikatan	
1. Hukum Perikatan	28
2. Perikatan Bersumber dari Persetujuan (Perjanjian)	32
3. Perikatan Bersumber dari Undang-Undang	37
4. Perikatan Bersumber dari Putusan Pengadilan, Moral, dan <i>Fatsoen</i>	39
E. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	44
B. Data	45
C. Cara/Teknik Pengumpulan Data	47
D. Analisis Data	47
E. Penarikan Kesimpulan	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Kewajiban Pembayaran Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Dalam Regulasi Penerbangan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perikatan	
1. Kewajiban Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan dan Hak Penarikan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan dalam Regulasi Penerbangan Nasional	49
2. Kewajiban Pembayaran Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan dan Hak Badan Usaha Angkutan Udara dalam Regulasi Penerbangan Nasional	53
3. Mekanisme Layanan Pengajuan <i>Flight Plan</i> , Penagihan, dan Pembayaran Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan	55

4.	Hubungan Hukum Perikatan Dalam Layanan Navigasi Penerbangan Antara Perum LPPNPI dan BUAU	61
B.	Upaya Hukum Penyelenggara Navigasi Penerbangan Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Kewajiban Pembayaran Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan	
1.	Kendala Dalam Penegakan Kewajiban Pembayaran Biaya PJNP	75
2.	Upaya Hukum Penyelesaian Permasalahan Piutang Biaya PJNP	89
3.	Peringatan Tertulis kepada BUAU dan Permohonan Pembinaan Regulator Penerbangan dalam Aspek Pengaturan serta Pengawasan	90
4.	Penetapan Bentuk apresiasi dan tindakan terhadap BUAU, serta Penyusunan <i>Service Level Agreement</i> sesuai Ketentuan PM 34/2024	92
5.	Negosiasi dan Mediasi Pembayaran Biaya PJNP	94
6.	Partisipasi Aktif dalam Proses PKPU dan Kepailitan BUAU	97
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		